

Analisis Penyediaan Air Minum Di Wilayah Kumuh Perkotaan Kota Padang

Azyyati Ridha Alfian^{1*}, Rifa Salsabilla², Septia Pristi Rahmah¹, Fea Firdani¹, Aria Gusti¹

¹ Bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding author: azyyatiridhaalfian@ph.unand.ac.id

Info Artikel: Diterima 9 Oktober 2023 ; Direvisi 14 Oktober 2024 ; Disetujui 14 Oktober 2024

Tersedia online : 24 Oktober 2024 ; Diterbitkan secara teratur : Oktober 2024

Cara sitasi: Alfian AR, Salsabilla R, Rahmah SP, Firdani F, Gusti A. Analisis Penyediaan Air Minum Di Wilayah Kumuh Perkotaan Kota Padang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2024 Oct;23(3):326-333. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.3.326-333>.

ABSTRAK

Latar belakang: Di Kota Padang terdapat 22 kelurahan permukiman kumuh, dimana salah satu indikator kumuh yaitu kurangnya penyediaan air minum. Masih terdapat 4,65% air minum tak layak di Kota Padang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan bulan Januari - Agustus 2023 di empat lokasi wilayah kumuh Kota Padang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan metode triangulasi dan bahan referensi.

Hasil: Berdasarkan penelitian terdapat kendala dalam penyediaan air minum. Kendalanya belum adanya kebijakan khusus yang mengatur penyediaan air minum di wilayah kumuh, serta tanggung jawab setiap SDM dari setiap instansi belum terfokus kepada penyediaan air minum di wilayah kumuh. Pelaksanaan penyediaan air minum belum berjalan dengan maksimal disebabkan kurangnya pendanaan untuk sambungan rumah ke masyarakat serta sarana dan prasarana yang disediakan belum mencukupi untuk masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

Simpulan: Penyediaan air minum di wilayah kumuh belum mencapai target nasional. Disarankan setiap instansi untuk melakukan koordinasi dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih dalam pelaksanaan penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

Kata kunci: Air; Air Minum; Penyediaan Air

ABSTRACT

Title: Analysis Of Drinking Water Provision In The Urban Slum Area Of Padang City

Background: In Padang City, there are 22 slum sub-districts, and one of the indicators of slums is the lack of provision of drinking water. There is still 4.65% of unsuitable drinking water in Padang City. The research aims to analyze the provision of drinking water in the urban slum areas of Padang City.

Method: This type of research is qualitative and was carried out in January–August 2023 in four locations in the slum areas of Padang City. Data collection techniques include in-depth interviews, document review, and observation. There were 14 research informants using purposive sampling techniques. Data analysis uses triangulation methods and reference materials.

Result: Based on research, there are obstacles to providing drinking water. The problem is that there is no specific policy that regulates the provision of drinking water in slum areas, and the responsibility of every human resource from each agency is not yet focused on providing drinking water in slum areas. The implementation of drinking water provision has not been running optimally due to the lack of funding for house connections to the community, and the facilities and infrastructure provided are not sufficient for the community in the urban slum areas of Padang City.

Conclusion: The provision of drinking water in slum areas has not reached the national target. It is recommended that each agency coordinate and empower the community to participate more in the implementation of drinking water supply in the urban slum areas of Padang City.

Keywords: Drinking Water; Water; Water Supply

PENDAHULUAN

Kekeringan telah melanda beberapa wilayah Indonesia, dan salah satu penyebabnya adalah pemanasan global. Kekeringan berkembang dengan cepat ketika curah hujan tidak mencukupi dan suhu sangat tinggi. Sebagai akibat dari pemanasan global, suhu permukaan bumi meningkat, yang akan memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Musim kemarau yang panjang, yang menyebabkan kerugian seperti kekurangan air minum, mungkin akan terjadi di wilayah Indonesia jika perubahan iklim ini terus terjadi tahun ini. Pencemaran lingkungan adalah penyebab utama masalah air ini, yang terwujud baik dari segi kuantitas maupun kualitas air. Salah satunya terkait dengan buang air besar sembarangan, yang merupakan singkatan dari kebiasaan buang air besar sembarangan dan layanan akses sanitasi yang tidak memadai.^{1,2,3}

Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari BPS juga menunjukkan ada sebesar 90,21% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata. Berdasarkan Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) di Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 akses kualitas air minum aman sebesar 11,9%, dan 40,8% masyarakat yang menggunakan sarana air minum bersumber dari air tanah. Selain itu sebanyak 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat risiko cemaran tinggi dan amat tinggi. Data SKAMRT juga menyatakan secara nasional akses air minum tidak aman dinilai dari kontaminasi *Escherichia coli* (E. Coli), TDS, pH, nitrat dan nitrit yaitu mencapai 88,1% sedangkan akses air minum tidak aman yang dinilai dari kontaminasi bakteri *Escherichia coli* saja yaitu 81,9% dan hanya 18,1% dinyatakan aman jika dinilai dari kontaminasi bakteri *Escherichia coli* secara nasional. Hasil studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan yang dilakukan pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air minum dari sarana yang terkontaminasi yaitu bakteri *Escherichia coli*.^{3,4,5}

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 ditingkat Sumatera Barat, terlihat bahwa penduduk yang mendapat akses air minum layak sebesar 85,23%, akses air minum aman

sebesar 10,09%, dan akses air minum perpipaan sebesar 28,40% dengan kata lain terdapat 919.832 penduduk yang tidak terlayani akses air minum layak di Sumatera Barat. Pada tahun 2021 masih ada 4,65% air tak layak minum di Kota Padang. Berdasarkan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 pemerintah memiliki target terhadap penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman yaitu 100% layak (termasuk 15% aman) dan 90% layak (termasuk 15% akses sanitasi layak dan aman). Tetapi untuk saat ini, target penyediaan air minum di Sumatera Barat khususnya Kota Padang belum mencapai target nasional, yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Permasalahan terkait penyediaan air minum ini dikarenakan masih rendahnya tingkat penyaluran air kepada masyarakat sehingga berefek pada tingkat kesehatan manusia yang semakin menurun. Juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, masih banyaknya pencemaran air yang dikarenakan dampak dari pemukiman dan industri yang menyebabkan air menjadi terkontaminasi oleh mikroorganisme berbahaya, dan juga diakibatkan alokasi anggaran dana di daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih sangat minim.^{6,7}

Permasalahan penyediaan air minum ini juga terjadi pada wilayah kumuh perkotaan atau disebut juga dengan permukiman kumuh. Permukiman kumuh didefinisikan sebagai wilayah tempat orang hidup dalam kondisi di bawah standar yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang buruk, dan kondisi yang tidak sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 14 Tahun 2018, salah satu dari standar teknis dalam penentuan pemukiman kumuh yaitu penyediaan air minum. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah masyarakat di lingkungan tersebut tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Artinya, masyarakat tersebut tidak memiliki akses terhadap air yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat lainnya, masyarakat di lingkungan tersebut tidak memenuhi kebutuhan minimum air minum harian,

yang artinya konsumsi air di rumah atau tempat kerja mereka tidak mencapai 60 liter per orang.⁸

Program penyediaan air minum yang dilakukan pada tahun 2021 pemerintah telah meresmikan 1.627 Sambungan Rumah Air Bersih Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang tersebar di 19 lokasi di Kota Padang. Dengan target 100-0-100, ini merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Padang. Khususnya, menghilangkan kawasan kumuh dan memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No 110 Tahun 2016, secara nasional terdapat 2594 kelurahan yang termasuk wilayah kumuh, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 99 kelurahan, dan khususnya Kota Padang merupakan kota yang wilayah kumuhnya lebih banyak dari pada kota yang lainnya di Sumatera Barat, yaitu ada 22 kelurahan.^{9,10}

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada wilayah kumuh di Kota Padang, untuk program penyediaan air minum yang dibawah oleh Kementerian PUPR sudah berjalan, tetapi airnya belum merata diberikan kepada seluruh masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada masyarakat, bahwa sebanyak 60% masyarakat berpendapat bahwa sarana penyediaan air yang mereka miliki tidak memenuhi syarat, seperti air berwarna kuning, air berbau, dan air keruh. Juga 40% masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber air yang berkesinambungan, dan tidak masuknya jaringan perpipaan ke wilayah tempat tinggal mereka. Terdapat beberapa lokasi kelurahan permukiman kumuh di Kota Padang yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya penyediaan air minum yang layak, dimana pemenuhan kebutuhan air minum di kelurahan tersebut belum mencapai target minimal 60 liter/orang/hari. Lokasi tersebut yaitu Kelurahan Bungus Timur sebanyak 70,73% atau 29 KK masih belum terpenuhi penyediaan air minumnya, Kelurahan Pisang sebanyak 50,00% atau 78 KK masih belum terpenuhi penyediaan air minumnya, Kelurahan Piai Tengah sebanyak 33,33% atau 140 KK tidak tersedianya akses air minum yang aman, dan terdapat juga lokasi yang sudah dilakukan intervensi terhadap penyediaan air minumnya yaitu Kelurahan Limau Manis sebanyak 97,82% atau 45 KK sudah terpenuhi air minumnya.¹¹

MATERI DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 4 wilayah kumuh perkotaan kota padang, yaitu Kelurahan Bungus Timur, Kelurahan Pisang, Kelurahan Piai Tengah, dan Kelurahan Limau Manis. Terdapat masalah dalam penyediaan air minum yang aman di area ini, dan masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki akses terhadap air yang memenuhi standar kualitas, oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di sana. Data dikumpulkan sepanjang bulan

Januari dan Agustus 2023. Penelitian menggunakan sumber informasi primer dan sekunder. Wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan 14 informan yang terdiri dari, Koordinator Kota Program Kotaku Kota Padang, Fasilitator Bidang Teknik Pamsimas, Manajer Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padang, Pemegang Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, 6 orang masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang. Pedoman pelaksanaan wawancara, alat perekam, lembar dokumentasi hasil wawancara, dan kamera merupakan bagian dari instrumen yang digunakan. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi merupakan langkah-langkah yang membentuk pengolahan data. Triangulasi sumber dan metodologi, serta bahan referensi, digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

INPUT

A. Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kebijakan mengenai penyediaan air minum di wilayah kumuh ini mengacu kepada Program Kotaku Kementerian PUPR dan Dinas Pemukiman yang mengacu kepada kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Untuk menetapkan nilai-nilai baru dalam masyarakat, organisasi sering kali menulis dan menerbitkan kebijakan yang mengatur perilaku karyawan. Kebijakan ini mengikat secara hukum dan berfungsi untuk menetapkan norma bagi organisasi (Dumn, 2003). Hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya setiap instansi sudah memiliki kebijakan terkait penyediaan air minum., tetapi di beberapa instansi kebijakan tersebut belum mengacu kepada penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan. Jadi instansi tersebut hanya melakukan penyediaan air minum secara umum saja, belum terfokus untuk wilayah kumuhnya.

Pengawasan kualitas air minum di masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas mengacu kepada kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan untuk Perusahaan Daerah Air Minum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dijelaskan bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab merumuskan kebijakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang bersumber dari strategi dan kebijakan nasional. Setelah rencana dan kebijakan nasional dirumuskan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota diberi

tanggung jawab untuk menetapkan persyaratan kesehatan, standar mutu kesehatan lingkungan, dan kebijakan pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Kota Padang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau program mengenai penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang, supaya semua instansi memiliki satu kebijakan yang sama dan terkait tujuan untuk penyediaan air minum di wilayah kumuh akan terlaksana lebih baik lagi.^{2,7}

Hal ini sejalan dengan penelitian Tuloli (2018), untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Gorontalo, khususnya yang tinggal di daerah kumuh, memiliki akses terhadap air bersih, program SPAM tengah dilaksanakan untuk meningkatkan sistem penyediaan air minum kota. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan permintaan air di wilayah tersebut di masa mendatang. Sejalan juga dengan penelitian Wini, dkk (2020) bahwasanya dari perspektif pembuatan kebijakan, harus ada program yang jelas dan komprehensif untuk tingkat atas, menengah, dan bawah terkait bantuan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu mempertimbangkan perumusan dan penyusunan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan air minum khusus untuk wilayah kumuh perkotaan Kota Padang, supaya setiap instansi memiliki kebijakan yang sama, sehingga memiliki tujuan yang saling berhubungan untuk penyediaan air minum di wilayah kumuh dan pelaksanaannya akan lebih terstruktur serta penyediaan air minum di wilayah kumuh akan lebih maksimal.^{12,13}

B. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan air minum di wilayah kumuh adalah Kementerian PUPR, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Permukiman, Camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas, Pokja Masyarakat dan Masyarakat setempat. Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing dalam penyediaan air minum di wilayah kumuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Firdaus (2020) bahwa daerah, instansi terkait, kepala desa beserta jajarannya, dan masyarakat di desa merupakan bagian dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan program ini. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki peran masing-masing. Setiap instansi memiliki tanggung jawab masing-masing dalam penyediaan air minum, tetapi tanggung jawab tersebut belum terfokus kepada penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dalam program penyediaan air minum di wilayah kumuh ini dan terkait sanitarian puskesmas sebaiknya ada penambahan petugas kesehatan lingkungan yang memenuhi standar di Puskesmas dan patut untuk di pertimbangkan agar program dan kegiatan yang

dilakukan dapat berjalan lebih optimal dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.¹⁴

C. Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait pendanaan penyediaan air minum di wilayah kumuh menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD, tetapi dana tersebut masih kurang karena target pemanfaatan sambungan rumahnya belum sampai 100%. Sedangkan kegiatan pengawasan kualitas air minum didanai oleh puskesmas, dan untuk perjalanan perharinya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk penyediaan air minum yang diberikan pemerintah, keberlanjutan programnya akan memakai dana dari swadaya masyarakat dan uang dari pelanggan untuk PDAM. Terkait dana ini sering menjadi masalah atau kendala dalam keberlangsungan penyediaan air minum, seperti beberapa masyarakat yang tidak membayar uang swadaya dan pelanggan yang menunggak membayar uang PDAM. Pendanaan adalah anggaran atau dana yang digunakan untuk mendukung pengembangan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudarsono dan Nurkholis (2020) bahwasanya penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena air minum merupakan layanan penting yang wajib disediakan oleh semua pemerintah. Namun, air minum hanya menerima 0,04% dari alokasi APBD. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan rendahnya alokasi APBD untuk air minum menunjukkan bahwa kebutuhan air masyarakat tidak menjadi prioritas pemerintah daerah dan DPRD. (Sudarsono, 2020). Terkait keberlanjutan program penyediaan air minum di masyarakat menggunakan dana dari swadaya masyarakat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar iuran. Berdasarkan penelitian Muttofi'ah (2020) juga mengatakan bahwa kesulitan keuangan menjadi salah satu alasan mengapa inisiatif Pamsimas tidak efektif. Ketika diminta membayar iuran program, beberapa warga memilih untuk tidak ikut serta, yang sungguh disayangkan.^{15,16}

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah anggaran tersebut yaitu meningkatkan alokasi APBD untuk infrastruktur air minum yang dikaitkan dengan kesadaran pemerintah daerah dan untuk permasalahan di masyarakat memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya dana yang disumbangkan oleh masyarakat akan dimanfaatkan juga untuk masyarakat nantinya untuk keberlanjutan penyediaan air minum di wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan kota padang terbagi menjadi 2 yaitu sarana dan prasarana fisik dalam penyediaan air minum serta sarana dan prasarana dalam melakukan inspeksi kualitas air minum di puskesmas. Sarana dan prasarana terhadap penyediaan air minum disediakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sarana dalam pembangunan disesuaikan dengan letak topografi wilayah

masyarakat. Sarana pembangunan penyediaan air minum dapat berupa pembuatan tempat penampungan air, pembangunan air baku, perpipaan, intake, pipa transmisi, bak reservoir dan pengolahan, bak reservoir, sambungan rumah, sumur bor, tandon dan jaringan pipa. Prasarana dalam program inspeksi kualitas air minum berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kualitas air minum dan formulir inspeksi kualitas air minum.

Terkait pengadaan sarana yang diberikan kepada masyarakat belum memadai untuk penyediaan air minumannya, masih ada beberapa masyarakat yang kekurangan pipa untuk mengalirkan air dari bak penampungan ke rumah mereka. Menurut Dewantoro dan Sitaresmi (2022), Sambungan rumah dari pipa air di reservoir ke jaringan layanan harus disediakan oleh sistem perpipaan, yang saat ini belum ada. Oleh karena itu, pentingnya tindak lanjut dari pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang yang dilakukan instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada instansi yang memberikan penyediaan teknis air minum terkait sarana dan prasarana yang masih kurang, karena kurangnya sarana dan prasarana penyediaan air minum akan menyebabkan tidak optimalnya ketersediaan air minum yang layak untuk masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.¹⁷

PROCESS

A. Perencanaan

Tahap perencanaan penyediaan air minum untuk masyarakat dimulai dari tim pendamping masyarakat yaitu fasilitator yang turun untuk melakukan survey lokasi, setelah itu melakukan pemecuan perubahan perilaku masyarakat, setelah itu mengidentifikasi masalah dan menganalisis situasi terkait infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyediaan air minum, lalu pemilihan sarana kegiatan, dan terakhir melakukan penyusunan rencana kerja masyarakat. Untuk perencanaan inspeksi kualitas air minum, dokumen yang ditelaah adalah SOP pengawasan kualitas air minum di puskesmas yaitu pada saat perencanaan menyiapkan alat tulis, menyiapkan form inspeksi sanitasi air minum, menyiapkan alat ukur, dan form rekomendasi pemeriksaan.

Perencanaan ini sejalan dengan penelitian Afiatun, dkk (2018) bahwasanya untuk memulai perencanaan air minum dimulai dari melihat lokasi, memperhitungkan kebutuhan air, menentukan jalur perpipaan hingga rencana anggaran pembiayaan. Untuk perencanaan kegiatan inspeksi air minum juga sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang diberikan, yaitu dimulai dengan menyiapkan form inspeksi sanitasi air minum, menyiapkan alat ukur dan form rekomendasi pemeriksaan. Untuk perencanaan sudah sesuai dilakukan dengan yang ada pada pedoman yang telah ditetapkan, oleh karena itu diharapkan untuk

semua instansi terlibat untuk selalu menerapkan perencanaan ini, supaya penyediaan air minum di wilayah kumuh terlaksana dengan baik dan diharapkan juga untuk meningkatkan perencanaan yang digunakan dalam penyediaan air minum. Perencanaan yang memiliki konsep yang jelas akan menimbulkan pelaksanaan yang tertata dengan baik.¹⁸

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan fisik penyediaan air minum melibatkan beberapa instansi, yaitu Kementerian PUPR, Dinas Permukiman, dan PDAM. Pelaksanaan penyediaan air minum ini belum merata diberikan kepada seluruh masyarakat di wilayah kumuh, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Kendala lain dalam penyediaan air minum ini juga disebabkan oleh kurangnya juga komitmen dari pemerintah dan masyarakat terhadap program penyediaan air minum. Kurangnya kolaborasi antar instansi dan pembiayaan operasional pada masyarakat yang sebagian tidak membayar iuran. Kendala ini juga disebabkan oleh ketersediaan lahan untuk pembangunan penyediaan air minum, perilaku masyarakat, dan topografi daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan inspeksi kualitas air minum terjadi juga kendala dalam pelaksanaannya yaitu tanggung jawab petugas sanitarian yang terlalu banyak sehingga pelaksanaan inspeksi tidak bisa berjalan secara maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sutomo, dkk (2021) bahwasanya sistem penyediaan air ini menunjukkan koordinasi antar lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (CSO), termasuk LSM dan komunitas yang berkembang ke daerah lain.¹⁹

Oleh karena itu, sebaiknya untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang perlunya komitmen yang kuat untuk melakukan pendampingan secara optimal dan menyeluruh oleh pemerintah atau tim fasilitator kepada kelompok masyarakat. Juga koordinasi yang berkesinambungan antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan air minum antara Dinas Permukiman, PDAM, Dinas Kesehatan Kota, dan juga Puskesmas terkait pengadaan penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

Terkait permasalahan sarana seperti jaringan perpipaan yang masih kurang dan perawatan sarana yang diberikan kurang baik, maka seharusnya kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sarana dan prasarana air minum melengkapi, mengelola, dan melakukan perawatan terhadap fasilitas penyediaan air minum yang diberikan. Juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyediaan air minum yang diberikan pemerintah ini memiliki dampak yang sangat positif, supaya masyarakat lebih mau untuk memberikan iuran yang mana nantinya akan dipakai dalam keberlanjutan program penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang. Sarana dan prasarana yang tersedia dengan kualitas dan kondisi yang baik akan memberikan hasil yang optimal dalam rangka

penyediaan air minum untuk masyarakat di wilayah kumuh.

C. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan pengawasan penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tim fasilitator akan turun kelapangan minimal 2 kali dalam seminggu untuk melihat apakah penyediaan air minum yang diberikan sudah memadai atau belum juga melihat berapa capaian yang diterima di lokasi. Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas air minum dalam waktu 1x 6 bulan untuk parameter kimia dan 1x 3 bulan untuk parameter bakteriologi. PDAM melakukan pemantauan 1 kali dalam sebulan, jika terjadi kendala atau kerusakan di lapangan maka langsung dilakukan tindakan perbaikan. Pengawasan teknis dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu tim fasilitator. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu. Tim fasilitator akan mengunjungi daerah yang diberikan penyediaan air minumannya, lalu melihat apakah penyediaan air minum yang diberikan sudah memadai atau belum juga melihat berapa capaian yang diterima di lokasi. Kelurahan juga melakukan evaluasi terkait penyediaan air minum di lokasi mereka. Terkait kelompok pengelola penyediaan air minum di masyarakat, mereka akan melakukan perbaikan jika saluran pada air tersumbat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nofiandi (2014) pemerintah dan masyarakat desa setempat bekerja sama di bawah bimbingan fasilitator masyarakat PAMSIMAS dari Kabupaten Dairi untuk mengawasi program PAMSIMAS. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, diperlukan pengawasan pada seluruh tindakan.²⁰

OUTPUT

Hasil keluaran dari penyediaan air minum di wilayah kumuh adalah Target pemenuhan penyediaan air minum untuk masyarakat yaitu 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa instansi terkait pemenuhan penyediaan air minum belum 100% dan belum merata diberikan untuk seluruh masyarakat di wilayah kumuh. Masyarakat juga menyatakan bahwasanya di wilayah tempat tinggal mereka penyediaan air minum belum merata untuk seluruh masyarakatnya, kecuali untuk daerah yang intervensinya sudah bagus, semua masyarakatnya sudah mendapatkan air minum yang layak. Data pada tahun 2022 menunjukkan capaian lokasi yang belum mencapai target nasional. Lokasi tersebut yaitu Kelurahan Bungus Timur sebanyak 70,73% masih belum terpenuhi, Kelurahan Pisang sebanyak 50,00% masih belum terpenuhi, Kelurahan Piai Tengah sebanyak 33,33% belum terpenuhi, dan terdapat juga lokasi yang sudah dilakukan intervensi terhadap penyediaan air minumannya tetapi masih belum sampai 100% yaitu Kelurahan Limau Manis sebanyak 97,82% sudah terpenuhi air minumannya.

Output dalam penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan kota padang ini belum mencapai target Inasional, yaitu untuk mencapai tujuan akses universal terhadap air minum dan sanitasi—khususnya, bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses penuh dan tanpa hambatan terhadap keduanya—Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air minum yang aman di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dari mulai dana, sarana dan prasarana dan juga pada saat pelaksanaan penyediaan air minum untuk masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang, kendala tersebut seperti kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat, kurangnya kolaborasi antar instansi dan masih kurangnya jaringan perpipaan, pembiayaan operasional pada masyarakat yang sebagian tidak membayar iuran, terkait topografi yang tinggi juga menjadi kendala dalam penyediaan air minum. Belum tercapainya pemenuhan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang ini juga sejalan dengan penelitian Herlinda, dkk (2020) bahwasanya Program PAMSIMAS hanya mampu melayani masyarakat kurang dari 20% dari jumlah penduduk di lokasi PAMSIMAS. Program PAMSIMAS setiap lokasi idealnya mampu melayani 50% dari total masyarakat di lokasi PAMSIMAS. Permasalahan tersebut terjadi karena kondisi alam, budaya masyarakat, pengelola sumber daya manusia dan perencanaan pembangunan yang semuanya mempengaruhi tujuan program PAMSIMAS. Oleh karena itu disarankan setiap instansi untuk melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang supaya setiap instansi bekerjasama dengan tujuan yang saling berhubungan untuk penyediaan air minum di wilayah kumuh dan pelaksanaannya akan lebih terstruktur serta penyediaan air minum di wilayah kumuh akan lebih maksimal.^{21,22,23,24,25}

SIMPULAN

1. Masukan (Input)
 - a. Belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
 - b. Setiap SDM dari masing – masing instansi memiliki tanggung jawab masing – masing dalam penyediaan air minum ini, tetapi tanggung jawab tersebut belum terfokus kepada penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
 - c. Dana untuk penyediaan air minum berasal dari APBN dan APBD.
 - d. Sarana dan prasarana yang sudah disediakan tetapi belum memadai atau belum mencukupi untuk semua masyarakat
2. Proses (Process)

Pelaksanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya maksimal dilakukan, hal ini

disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat, kurangnya kolaborasi antar instansi dan masih kurangnya jaringan perpipaan, pembiayaan operasional pada masyarakat yang sebagian tidak membayar iuran, terkait topografi yang tinggi juga menjadi kendala dalam penyediaan air minum.

3. Keluaran (Output)

Dalam penyediaan air minum di wilayah kumuh perkotaan kota padang ini belum mencapai target nasional, yaitu target SDGs untuk mendekatkan akses air minum di pedesaan dan pinggiran kota dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi bagi semua masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Khadka NS. Perubahan Iklim: 2022 disebut Tahun Panas dan Kekeringan. BBC News Indoensia. 2022, p. <https://www.bbc.com/Indonesia/majalah-62678808>.
2. Kekeringan Akibat Perubahan Iklim. Indonesia: Biodiversity Warriors; 2020
3. Biro Komunikasi dan Pelayanan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik. Pemerintah Targetkan 2020-2024 Masyarakat Indonesia Akses Air Minum Layak 100%. Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2022.
4. Badan Pusat Statistik. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020; 2020. ‘
5. Litbangkes H. Hasil SKAM RT sebagai Baseline Data Kualitas Air Minum Aman. Indonesia: Humas Litbangkes, Kemenkes; 2021.
6. National Water & Sanitation Information Service. Infografis Air Minum. Indonesia; 2021.
7. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indonesia; 2020
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh [Internet]. MPU dan PRRI. 2018, p. 1–43. Available from: <http://www.pu.go.id/>
9. Masriadi. Epidemiologi Penyakit Menular. Pengaruh Kualitas Pelayanan. Jurnal EMBA. 2016;109: p. 109–119
10. Rais W. Wako Hendri Septa Resmikan 1.627 Sambungan Rumah Air Bersih Program Pamsimas. Padang.go.id. 2022. p. <https://padang.go.id/wako-hendri-113-septa-resmikan-16>.
11. SK Kumuh N0 519 Tahun 2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 2020. p. 1–63.
12. Tuloli N, Tuloli MY. Identifikasi dan Program Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo Pendahuluan Pelayanan air bersih ataupun air minum di kawasan perkotaan masih sangat kurang terutama di kota metropolitan , kota besar , kota. 115 2018;16(1):49–58. <https://doi.org/10.37031/jt.v16i1.35>
13. Wini PA, Messakh JJ, Harijono D. Analisis Peyediaan Air Bersih Pedesaan Di Desa Oenoni 1 Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Jurnal Batakarang. 2020;1(1).
14. Firdaus R. Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Public Administration Journal. 2020;3(2):1–8. <https://doi.org/10.33087/talentsipil.v2i1.12>
15. Sudarsono RA, Nurkholis N. Pendanaan dalam Pencapaian Akses Universal Air Minum di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 2020;20(1):1–19. <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.01>
16. Muttofi'ah. Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu) ; 2020, p. 150–160
17. Dewantoro W, Sitaresmi DT. Potensi dan permasalahan penyediaan air bersih di Kelurahan Kariangau menggunakan root cause tree analysis. Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif. 2022;17(1):167. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.50919>
18. Afiatun E, Wahyuni S, Taruna RD. Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Di Wilayah Ikk Leuwimunding, Palasah, Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Journal of Community Based Environmental Engineering and Management. 2019;2(1):30. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v2i1.1454>
19. Sutomo S, Sagala S, Sutomo B, Wrinarti S, Sanjaya G. Accelerating the provision of safe water supply in urban and rural areas of Indonesia. Kesmas. 2021;16(3):137–44. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i3.5225>
20. Nofiandi H. Peran Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di 116 Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Angewandte Chemie International Edition. 2014; 6(11): 951–952.
21. Herlinda D, Utami BC, Ruslihyardy R. Water Supply and Sanitation: Problems on Community Empowerment Based Program in Indragiri Hulu, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012030>
22. Ikhwan. 4,65 Persen Air di Padang Tak Layak Diminum. merdeka.com. 2021. p. <https://www.merdeka.com/peristiwa/465-persen-air-d>.

23. Junaidi. Pengaruh Tugas Rangkap Terhadap Kinerja Sanitarian Puskesmas Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ekonomi*. 2020;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas.
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.



©2024. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.